

DAFTAR PUSTAKA

- Amyulianthy, R., Anto, L. O., & Budi, S. (2020). Temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap opini audit (Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 45–63.
- Apriani, R. (2025). Pengaruh temuan sistem pengendalian internal, temuan kepatuhan peraturan perundangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah kota di Pulau Sumatra. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 1–18.
- Arifuddin, & Halim, A. (2012). *Akuntansi Pemerintahan* (Edisi ke-2). Salemba Empat.
- Auditing Standards Board (ASB). (2021). *Statement on Auditing Standards No. 145: Understanding the Entity and Its Environment and Assessing the Risks of Material Misstatement*. AICPA.
- Australian National Audit Office (ANAO). (2012). *Implementation of Audit Recommendations*. ANAO.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*. BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2021). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*. BPK RI.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (n.d.). BPK temukan 945 permasalahan SPI dalam LKKL. Warta BPK. Diakses pada 2025, dari <https://warta.bpk.go.id/bpk-temukan-945-permasalahan-spi-dalam-lkkl/>

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (n.d.). BPK temukan indikasi kerugian negara senilai Rp371 miliar pada PT Indofarma dan anak perusahaan. BPK RI. Diakses pada 2025, dari <https://www.bpk.go.id/news/bpk-temukan-indikasi-kerugian-negara-senilai-rp371-miliar-pada-pt-indofarma-dan-anak-perusahaan>

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (n.d.). Skandal Jiwasraya dan nasib hasil audit BPK. Warta BPK. Diakses pada 2025, dari <https://warta.bpk.go.id/skandal-jiwasraya-dan-nasib-hasil-audit-bpk/>

Baso, A., et al. (2025). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 6(1), 10–28.

Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Edisi ke-3). Erlangga.

Bastian, I. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Edisi ke-3). Salemba Empat.

Bastian, I. (2014). *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah* (Edisi ke-3). Salemba Empat.

Bastian, I. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Erlangga.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

(2013). Internal Control – Integrated Framework. COSO.

Furqan, A. C. (2020). Audit Sektor Publik: Dari Teori ke Praktik. Universitas Hasanuddin Press.

Ge, W., et al. (2022). Internal control weaknesses and accrual quality: Evidence from government entities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(3), 106–122.

Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi ke-5). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 (Edisi ke-7). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2015). Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan (Jilid 1, Edisi ke-5). UPP STIM YKPN.

Hariningsih, S. P., & Marita. (2019). Pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap kualitas opini laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(2), 183–198.

Hidayat, A., & Prasetyo, B. (2021). Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap opini audit BPK (Studi pada pemerintah daerah di Indonesia). *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 120–135.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2021). Standar Audit (SA) 700: Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan. IAPI.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2021). Standar Audit (SA) 705: Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen. IAPI.

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). (2019). ISSAI 400: Fundamental Principles of Compliance Auditing. INTOSAI.

Iswanto, B. (2019). Manajemen Tindak Lanjut Rekomendasi BPK. Penerbit BPKP.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi ke-3). UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2019). Manajemen Keuangan Daerah (Edisi ke-2). Erlangga.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Andi.

Mulyadi. (2014). Auditing (Buku 1, Edisi ke-6). Salemba Empat.

Mulyadi. (2017). Auditing (Buku 2, Edisi ke-6). Salemba Empat.

Mutiara, S., Masnila, N., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan pada perundang-undangan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 55–72.

Nugraha, D., & Susanto, E. (2022). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kepatuhan peraturan perundang-undangan terhadap opini audit BPK. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 88–104.

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Purba, H. (2024). Pengaruh temuan kepatuhan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan temuan sistem pengendalian internal terhadap opini audit laporan keuangan (Studi empiris BPK Perwakilan Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 5(1), 33–49.

Rai, I. G. A. (2007). *Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*. Salemba Empat.

Rai, I. G. A. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus (Edisi ke-2)*. Salemba Empat.

Santoso, S. (2012). Analisis SPSS pada Statistik Parametrik. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) (Edisi ke-2). Alfabeta.

Tabengan. (n.d.). Ditemukan 308 kasus nilai Rp28,18 miliar kerugian daerah: DPRD Palangka Raya keluarkan 4 rekomendasi LHP BPK RI. Diakses pada 2025, dari <https://www.tabengan.co.id/bacaberita/134475/ditemukan-308-kasus-nilai-rp2818-miliar-kerugian-daerah-sisa-rp1474-miliar-dprd-palangka-raya-keluarkan-4-rekomendasi-lhp-bpk-ri/>

Ulum, I. M. D. (2012). Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi ke-2). Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja* (Edisi ke-5). Rajawali Pers.

Widodo, O. P. (2017). Kelemahan sistem pengendalian intern dalam laporan hasil pemeriksaan BPK: Analisis dan implikasinya. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 3(1), 20–36.

Zimmerman, J. L. (2022). Agency theory, information asymmetry, and internal control. *Journal of Financial Economics*, 40(1), 57–74.